

Analisis kebutuhan lokal (*Need Assessment*) KPHP Bungo II dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak

Marwoto^{1*}, Ahyauddin¹, Adela Salsabila Putri¹

¹Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Jambi

*E-mail: marwoto@unja.ac.id

Artikel diterima : 28 Mei 2024 Revisi diterima 22 Agustus 2024

ABSTRACT

Forest development based on forest management unit (KPH) is an effort to present the state at visible level in forestry management as an effort to realize forest management optimization and increase community welfare. The research was conducted based on historical facts which government's efforts in this case the Ministry of Environment and Forestry which intends to carry out management at the site level. FMUP (forest management unit production) based forest management promotes synergy between increasing family livelihoods and forest stability. The aim of this research is to assess and identify the needs of KPHP Bungo in realizing sustainable forest resource management and increasing institutional capacity. This research was conducted at KPHP Bungo II which is located in Bungo Regency, Jambi Province. The research approach used were a mixed method (mixed-method), namely a research method to explore and understand the meaning of the problems that were used as research objects that would be quantified using a Likert scale. The concept that applied in implementing this local need assessment was a combination of institutional concepts with the concept of community-based natural resource management. The data analysis in this study was based on the scoring results using the Likert scale concept by changing the qualitative parameters into quantitative ones. The assessment was carried out by researchers with informants who were relevant to the research topic, so the formula used was the interval formula which is based on 5 (five) intervals. Function monitoring activities of FMUs are principally focused on ongoing activities by regularly gathering information based on predetermined indicators. The results showed that the performance of the bungo II KPHP which was not optimal was caused by several factors, namely the obstacles to regulation of institutional capacity, human resource capacity and community capacity. If the forest utilization was still running, management independence according to the bungo II KPHP physique achieved. The results of this research indicate that the performance of KPHP Bungo II has not been optimal in carrying out the operationalization of KPH to realize sustainable community-based forest resource management due to many factors, including regulatory obstacles, institutional capacity, human resource capacity and community capacity.

Keyword: Analysis, Kphp, needs, site level.

ABSTRAK

Pembangunan hutan berbasis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan upaya menghadirkan negara di tingkat tapak dalam pengelolaan kehutanan sebagai upaya mewujudkan optimalisasi pengelolaan hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian dilakukan dengan berdasarkan fakta-fakta historis yang merupakan usaha pemerintah dalam hal ini KLHK yang berniat melakukan pengelolaan sampai pada tingkat tapak. Pengelolaan hutan berbasis KPH mengedepankan sinergitas antara peningkatan nafkah keluarga dan kemantapan hutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai dan mengidentifikasi kebutuhan KPHP Bungo dalam mewujudkan pengelolaan sumberdaya hutan secara berkelanjutan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Penelitian ini dilakukan di KPHP Bungo II yang berlokasi di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode campuran (*mixed method*) yaitu metode penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian yang akan dikuantifikasi dengan menggunakan skala likert. Konsep yang diterapkan dalam pelaksanaan *need assessment* lokal ini adalah perpaduan konsep kelembagaan dengan konsep pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Analisis data dalam penelitian ini berdasarkan hasil *scoring* menggunakan konsep skala likert dengan mengubah parameter kualitatif menjadi kuantitatif. Penilaian dilakukan oleh peneliti dengan informan yang relevan dengan topik penelitian, mengingat rumus yang digunakan adalah rumus interval yang didasarkan pada 5 (lima) interval. Fungsi kegiatan pemantauan terhadap KPH pada prinsipnya difokuskan pada kegiatan yang sedang dilaksanakan dengan cara menggali informasi secara regular berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja KPHP Bungo II yang belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor yaitu hambatan regulasi, kapasitas kelembagaan, kapasitas SDM dan kapasitas masyarakat. Apabila kegiatan pemanfaatan hutan masih berjalan maka kemandirian pengelolaan sesuai dengan visi KPHP Bungo II tidak dapat tercapai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya Kinerja KPHP Bungo II yang belum optimal dalam menyelenggarakan operasionalisasi KPH untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya hutan lestari berbasis masyarakat disebabkan oleh banyak faktor, antara lain hambatan regulasi, kapasitas kelembagaan, kapasitas SDM dan kapasitas masyarakat.

Kata kunci: Analisis, kebutuhan, KPHP, tingkat tapak.

PENDAHULUAN

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan sistem pengelolaan hutan yang dapat menjamin terwujudnya kelestarian fungsi dan manfaat hutan dari aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Dalam hubungannya antara hutan dengan masyarakat, isu akses masyarakat menjadi satu aspek yang penting dan perlu perhatian besar (Irawan dkk., 2017). Dalam perkembangannya, KPH mengalami banyak tantangan terutama dari daerah akibat desentralisasi otonomi daerah. Desentralisasi muncul sebagai hal yang penting instrumen lingkungan dan pembangunan kebijakan dalam dua dekade terakhir. Para pemimpin politik dan birokrat, donor internasional, dan di banyak tempat penduduk lokal dan pemimpin mereka telah mulai melihat desentralisasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik-ekonomi dan kebijakan.

Dalam skema pembangunan daerah, pembangunan kehutanan dikategorikan sebagai program pilihan lain dan bukan sebagai program prioritas utama, sehingga tidak mengharuskan daerah untuk menjadikan pembangunan KPH menjadi prioritas utama. Kurangnya dukungan dan adanya keragu-raguan daerah terhadap pembangunan KPH ini mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pembangunan KPH.

Sumber daya yang dikendalikan pemerintah, dan manajemen tingkat lokal harus belajar untuk menyesuaikan masalah sumber daya dengan tata kelola lembaga dan teknik manajemen khusus jika kita ingin mengelola sumber daya secara efektif. Peran kelembagaan lokal penting untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang sedang dikembangkan oleh pemerintah (Rubynski dkk., 2018). Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung dan memperkuat pengelolaan hutan melalui operasionalisasi KPH dan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan kapasitas lokal untuk mengelola hutan dan sumber daya alam serta meningkatkan penghidupan masyarakat berbasis hutan yang berkelanjutan di wilayah sasaran adalah dengan melakukan penilaian kinerja kelembagaan KPHP Bungo II dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Pembangunan hutan berbasis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan upaya menghadirkan negara di tingkat tapak dalam pengelolaan kehutanan sebagai upaya mewujudkan optimalisasi pengelolaan hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Landasan pembangunan KPH ini sesungguhnya merupakan amanat Undang-Undang Kehutanan No 41 Tahun 1999. Dalam perjalanannya Pembangunan KPH

mengalami banyak hambatan, sehingga perkembangannya belum memuaskan. Pengelolaan hutan melalui KPH menjadi harapan bersama dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan sebagai ancaman terhadap peningkatan gas rumah kaca, perubahan iklim beserta dampaknya.

Beragam kepentingan dan pengaruh yang dimiliki berbagai pengguna di wilayah kerja KPHP Bungo menimbulkan berbagai masalah pengelolaan, antara lain; a) klaim wilayah kelola oleh masyarakat sekitar wilayah kelola KPH, b) KPH sebagai pengelola dari bentuk akses hak pemerintah, c) pendatang spontan yang menggunakan kawasan hutan dari jual beli bahan dan, d) pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan hutan. Keempat entitas komunitas tersebut saling bersaing dalam perebutan hak pemanfaatan kawasan hutan melalui berbagai bentuk modal yang dimiliki.

Penelitian dilakukan didasari oleh fakta-fakta historis usaha pemerintah dan dalam hal ini akan dilakukan pengelolaan sampai pada tingkat tapak oleh KLHK. Mengedepankan sinergitas antara peningkatan nafkah keluarga dan kemandirian hutan merupakan tujuan utama pengelolaan hutan berbasis KPH. Pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat secara berkelanjutan merupakan salah satu konsep pengelolaan hutan yang diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kelestarian sumberdaya hutan dan naiknya pendapatan masyarakat sekitar hutan. Pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat tidak lain adalah penggunaan sumberdaya hutan secara bersama oleh masyarakat. Dalam konsep ini masyarakat akan didorong sehingga mampu berkolaborasi dengan KPH atau bahkan mampu secara mandiri untuk melakukan pengelolaan sumberdaya hutan.

Penguatan kelembagaan KPH dan peningkatan kapasitas masyarakat menjadi isu strategis di bidang kehutanan. Penguatan kelembagaan KPH dan masyarakat diharapkan dapat bersinergi dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak. Kapasitas masyarakat yang lemah dan kapasitas kelembagaan KPH yang masih terbatas hingga saat ini menjadi hambatan dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Situasi ini juga disinyalir menjadi hambatan bagi KPHP Bungo II dalam melaksanakan pengelolaan hutan lestari di tingkat Tapak, seperti yang tertuang dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD), yang telah disahkan dengan SK Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: SK.8658/MENLHK-KPHP/KPPHP/HPL.O/12/2018.

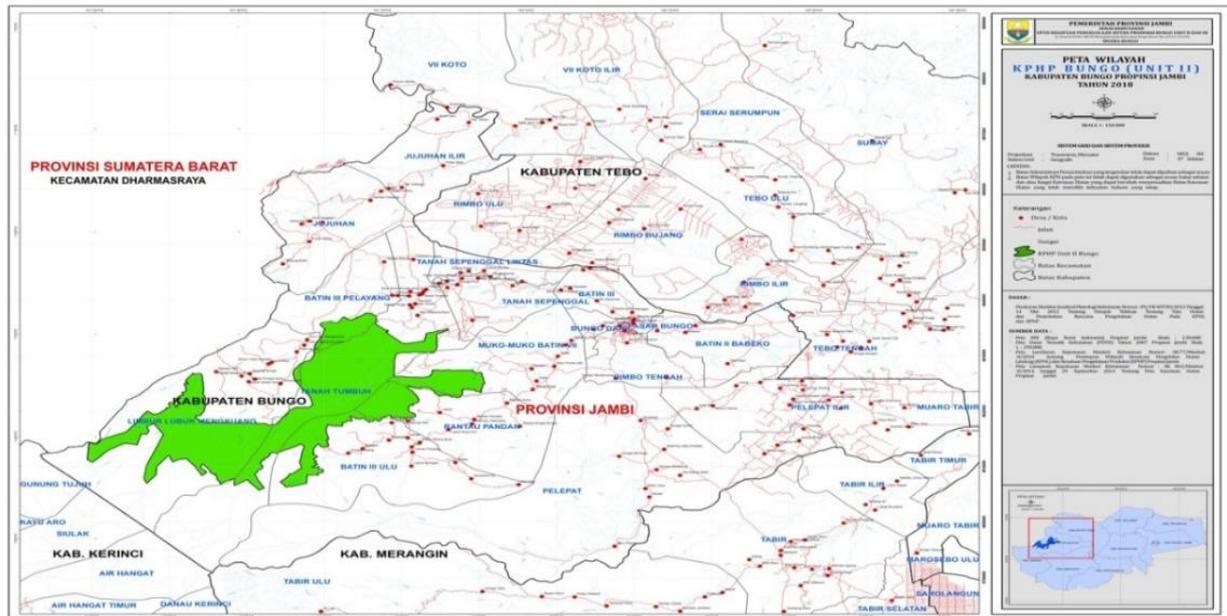
pengelolaan sumberdaya hutan secara berkelanjutan pada tingkat tapak.

Langkah awal penelitian oleh KPHP Bungo ini bertujuan dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat adalah melaksanakan penilaian kebutuhan (*need assessment*). Penilaian ini menjadi pijakan bagi pelaksanaan penguatan kelembagaan dan penguatan kapasitas masyarakat dalam

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah KPHP Bungo II Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, yang dilaksanakan pada bulan April 2020 sampai dengan Juni 2020.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

Prosedur Penelitian

Pendekatan dan Model (Strategi) Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode campuran (*mixed-method*) yaitu metode penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian yang akan dikuantifikasi dengan menggunakan skala likert. Model (strategi) yang digunakan adalah studi kasus yaitu model (strategi) penelitian yang di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas dan proses obyek penelitian.

Sampel pada penelitian ini adalah seluruh rangkaian kegiatan yang ada di KPHP Bungo II dan responden merupakan seluruh sumberdaya manusia yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ada di KPHP Bungo II meliputi; 1) Tenaga penyuluh, 2) Kelompok tani hutan/fasilitator pemberdaya.

Konsep Pelaksanaan Penelitian

Dalam konsep ini dipandang bahwa input terpenting untuk mewujudkan operasionalisasi

KPH adalah penguatan; a) kapasitas kelembagaan,

b) kapasitas sumberdaya manusia yang mantap, dan c) dukungan dan kapasitas masyarakat yang kuat. Operasionalisasi KPH setidaknya dilihat dengan dua indikator yakni 1) KPH mampu melaksanakan perencanaan hutan dan 2) KPH mampu melaksanakan kegiatan pemanfaatan sumberdaya hutan bersama masyarakat.

Penelitian *need assessment* lokal KPHP Bungo II dilaksanakan melalui beberapa tahapan yakni, 1) Penyediaan kriteria penilaian, 2) Penilaian tingkat lokal melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam dengan pegawai KPH dan masyarakat lokal, 3) Validasi penilaian.

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Kantor KPHP Bungo yang dihadiri oleh personil KPH Bungo meliputi Kepala UPTD KPHP Bungo, Kepala Seksi, Kepala Resort, Pegawai KPHP, Tenaga Kontrak dan Tenaga Bakti Rimbawan. Pelaksanaan diskusi terfokus dan wawancara secara mendalam dilaksanakan di tingkat lokal yang difokuskan menggali informasi tentang; a) kinerja pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPHP Bungo II, b) hambatan yang mempengaruhi kinerja, dan c) kebutuhan prioritas untuk mewujudkan peningkatan kinerja pengelolaan hutan.

Teknik Pengumpulan Data

Data dan informasi yang dibutuhkan penelitian ini dikumpulkan melalui: (1) Studi Pustaka (Dokumen), (2) *Indepth Interview*, dan (3) Observasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini berdasarkan hasil skoring menggunakan konsep skala Likert dengan mengubah parameter kualitatif menjadi kuantitatif. Penilaian dilakukan oleh peneliti dengan informan yang relevan dengan topik penelitian, Teknik skoring didasarkan 5 (lima) kriteria sebagai pertanyaan kunci pada masing-masing sub-indikator dengan ketentuan sebagai berikut: a). **Nilai 1** : Tidak ada satupun, sesuai kriteria yang ditetapkan; b). **Nilai 2** : Ada 1, sesuai kriteria yang ditetapkan; c). **Nilai 3** : Ada 2, sesuai kriteria yang ditetapkan; d). **Nilai 4** : Ada 3, sesuai kriteria yang ditetapkan; e). **Nilai 5** : Ada lebih dari 3, sesuai kriteria yang ditetapkan,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapasitas Kelembagaan

Lembaga adalah aturan main dalam masyarakat atau, secara lebih formal, merupakan batasan yang dirancang secara manusiawi yang membentuk interaksi manusia. Akibatnya, mereka menyusun insentif dalam pertukaran manusia, baik politik, sosial, atau ekonomi. Perubahan kelembagaan membentuk cara masyarakat berkembang sepanjang waktu dan karenanya merupakan kunci untuk memahami perubahan historis. Keberhasilan pengelolaan hutan sebagai sumber daya milik bersama ditentukan oleh aspek kelembagaan, kelembagaan berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan sikap dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan hutan (Hamzah dkk., 2015).

Berdasarkan hasil kajian kapasitas kelembagaan ditemukan bahwa secara keseluruhan kapasitas kelembagaan KPHP Bungo II termasuk kategori sedang. Kapasitas kelembagaan dikategorikan sedang, namun harus segera dilakukan penetapan resort secara definitif karena masalah ini menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari berbasis masyarakat. Peran utama KPH adalah sebagai pengelola, bukan sebagai administrator, sehingga pemenuhan dan penguatan kelembagaan di resort dinilai sebagai hal mendasar agar operasionalisasi KPH dapat berjalan.

Kegiatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat di wilayah KPHP membutuhkan jumlah tenaga penyuluh dan fasilitator pemberdayaan yang

memadai, sehingga masyarakat dan KPHP dapat bersinergi dalam menjalankan pengelolaan hutan. Pengaturan kelembagaan yang berkembang secara lokal diatur oleh komunitas yang stabil dan dilindungi dari kekuatan luar (Dietz dkk, 003). Kondisi saat ini, jumlah tenaga penyuluh kehutanan masih kurang memadai pada KPHP Bungo II dinilai kurang dalam mendukung visi KPHP Bungo II, yakni terwujudnya kemandirian pengelolaan hutan lestari untuk kesejahteraan masyarakat.

Kapasitas Sumberdaya Manusia

Hasil penilaian kapasitas sumberdaya manusia KPHP Bungo II secara umum dikategorikan dalam kategori sedang. Kapasitas sumberdaya manusia KPHP Bungo II yang tergolong cukup memadai, namun masih harus ditingkatkan kemampuannya dalam bidang pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan hutan dan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan monitoring dan pelaporan kegiatan pengelolaan hutan. Kegiatan monitoring dan pelaporan dalam pengelolaan hutan memiliki peranan penting dalam siklus manajemen yakni sebagai input dalam perencanaan selanjutnya.

Fungsi Kegiatan pemantauan terhadap KPH pada prinsipnya difokuskan pada kegiatan yang sedang dilaksanakan dengan cara menggali informasi secara reguler berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

Para profesional sumber daya alam semakin dihadapkan pada tantangan dalam menumbuhkan dukungan berbasis masyarakat untuk restorasi ekosistem. Meskipun upaya penelitian ekstensif telah diarahkan untuk memahami dimensi biofisik konservasi, literatur tersebut kurang memberikan panduan tentang cara berhasil mengintegrasikan pemangku kepentingan masyarakat ke dalam perencanaan restorasi. Peran serta masyarakat amat penting untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup (Siep dkk., 2019). Secara umum kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, berdasarkan hasil kajian, termasuk dalam kategori rendah. Kelompok tani hutan yang terbentuk dalam menunjang pengelolaan hutan berbasis masyarakat di wilayah KPHP Bungo II saat ini, belum menyusun rencana pengelolaan hutan. Hal ini menguatkan pendapat, bahwa masyarakat lokal masih memiliki kapasitas yang tergolong rendah dalam menyelenggarakan pengelolaan hutan.

Namun, tragedi milik bersama muncul kembali dalam masalah polusi. Di sini bukan masalah

mengambil sesuatu dari milik bersama, tetapi memasukkan sesuatu ke dalam air limbah, atau limbah kimia, radioaktif, dan panas ke dalam air, asap berbahaya dan berbahaya ke udara, dan tanda-tanda iklan yang mengganggu dan tidak menyenangkan ke garis pandang. Dalam kerangka pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan, dibutuhkan fasilitasi dan pendampingan agar kapasitas masyarakat menjadi kuat baik dalam hal kelola kawasan hutan, kelola kelembagaan maupun kelola usaha. Kapasitas kelompok tani hutan dalam hal kelola kawasan hutan, kelola kelembagaan dan kelola usaha masih tergolong sedang. Belum adanya aktivitas perencanaan, pengelolaan hutan dan pengembangan usaha berbasis perhutanan sosial di kawasan hutan yang telah mendapatkan izin perhutanan sosial menguatkan pentingnya kegiatan fasilitasi dan pendampingan terhadap kelompok tani hutan tersebut.

Penilaian Kinerja Perencanaan Hutan

Berdasarkan hasil kajian diperoleh bahwa secara keseluruhan kinerja perencanaan KPHP Bungo II termasuk kategori sedang. Meskipun memiliki kinerja perencanaan hutan yang termasuk kategori sedang namun aspek perencanaan hutan UPT KPHP Bungo II masih memiliki beberapa hambatan khususnya terkait dengan penyusunan dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP) dan dokumen rencana pengelolaan hutan jangka pendek (RPHJPD). Secara teknis operasional, sesungguhnya ini tidak menjadi hambatan, akan tetapi mengalami kendala dari sisi administrasi khususnya terkait dengan masalah pendanaan, karena tiap RPH JP mendapatkan pendanaan tersendiri.

Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Kehutanan

Secara keseluruhan kinerja usaha pemanfaatan hutan KPHP Bungo II termasuk kategori sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa hanya sebagian saja usaha pemanfaatan hutan yang aktif berjalan. Secara rinci penilaian kinerja pemanfaatan hutan KPHP Bungo II.

Kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu baik itu hasil hutan kayu hutan alam maupun hutan tanaman tergolong rendah. Hambatan utama yang dihadapi adalah terkait dengan regulasi dan pendanaan. Regulasi pemanfaatan hasil hutan kayu yang ada saat ini belum memberikan ruang bagi KPHP untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dari hutan alam. Sementara itu pengembangan hutan tanaman terkendala pada sisi pendanaan. Kedua hambatan ini menyebabkan belum terealisasi

kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu di wilayah KPH.

Usaha pemanfaatan hasil hutan yang dilaksanakan oleh KPHP Bungo II hanyalah difokuskan pada pengembangan hasil hutan bukan kayu melalui kemitraan dengan masyarakat. Kinerja pengembangan usaha ini masih tergolong sedang karena upaya yang dilakukan selama ini masih pada tahap inisiasi awal. Meskipun sarana dan prasarana produksi telah tersedia dan inisiasi awal pengembangan usaha telah dilakukan, akan tetapi, legalitas kemitraan antara KPH dengan masyarakat belum terbangun sehingga belum ada payung hukum untuk pengembangan usaha HHBK ini.

Penilaian Kinerja Rehabilitasi, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Berdasarkan hasil kajian diperoleh kinerja KPHP Bungo II terkait dengan ketiga komponen tersebut, secara umum termasuk kategori rendah. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di dalam kawasan hutan tidak terlaksana sesuai dengan target yang tertuang dalam RPHJP. Kendala pendanaan merupakan faktor penghambat yang menyebabkan rencana rehabilitasi tidak terealisasi. Akan tetapi, kegiatan rehabilitasi di luar kawasan hutan tetap dilaksanakan oleh KPHP Bungo II, sesuai dengan tupoksinya bahwa KPH memiliki tugas melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan, namun menggunakan pendanaan APBD.

Wilayah pengelolaan yang tergolong sangat luas dan jumlah tenaga yang terbatas menjadi kendala bagi KPHP Bungo II dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan. Wilayah yang luas ini menimbulkan informasi tidak sempurna terhadap kegiatan ilegal di dalam kawasan hutan. Sementara itu, upaya untuk menambah personil tenaga polisi hutan bisa menjadi pilihan namun kebijakan ini perlu dikaji mendalam sehingga tidak hanya akan menambah biaya (*enforcement cost*) terhadap kawasan hutan yang mahal sementara kinerja di lapangan tidak begitu signifikan.

Ruang lingkup kegiatan konservasi alam di dalam wilayah kerja KPH adalah melakukan perlindungan sistem penyangga kehidupan, melakukan pemetaan kawasan hutan bernilai konservasi tinggi, melakukan pengelolaan kawasan yang bernilai konservasi tinggi, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kawasan yang bernilai konservasi tinggi di wilayah KPH. Komponen kegiatan ini belum dilaksanakan oleh KPHP Bungo II, bahkan tidak masuk dalam rencana anggaran.

Kebutuhan Prioritas dalam Mewujudkan Pengelolaan Sumber daya Alam Berbasis Masyarakat

Kapasitas kelembagaan KPHP Bungo II yang tergolong sedang dalam mendukung pengelolaan hutan adalah belum terbentuknya secara definitif kelembagaan di tingkat resort. Hal ini menyebabkan aktivitas pengelolaan hutan menjadi terhambat. Setelah upaya pembentukan resort ini terpenuhi maka penguatan kapasitas SDM juga harus menjadi perhatian.

Kebijakan untuk menambah personil bagi KPH dipandang baik namun kelihatannya sulit diimplementasikan dalam jangka waktu singkat karena terkait politik penganggaran baik di Kementerian LHK maupun di daerah. Strategi yang dapat dilakukan agar pengelolaan hutan di tingkat resort dapat berjalan adalah melalui optimalisasi pendayagunaan tenaga yang ada. Pendayagunaan SDM diarahkan untuk menguatkan tenaga penyuluh dan fasilitator pemberdayaan. Tentunya, kebijakan ini harus ditunjang dengan penguatan kapasitas SDM, meliputi penguatan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, resolusi konflik, dan pelatihan kewirausahaan. Pengetahuan ini dibutuhkan dalam mendorong penyelesaian konflik dan percepatan perhutanan sosial yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat dan pelestarian fungsi hutan.

Pada sisi lain, kendala kegiatan pemanfaatan hutan, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, disebabkan karena belum tersedia payung hukum bagi KPHP Bungo II untuk menjalankan kegiatan bisnis usaha pemanfaatan hutan. inisiasi kegiatan pemanfaatan hutan, khususnya hasil hutan bukan kayu telah dilaksanakan, namun upaya pengembangan bisnis belum dikembangkan karena salah satunya terkendala pada payung hukum penyelenggaraan bisnis bagi KPHP.

Penyediaan mekanisme bisnis ini melalui Badan Umum Layanan Daerah telah dilaksanakan melalui penyediaan draft peraturan gubernur sebagai persyaratan administratif dalam pengajuan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. Namun, hingga kini Draf Pergub tersebut belum diajukan ke Gubernur. Kebutuhan prioritas yang perlu dilakukan adalah memfasilitasi agar Pergub tentang PPK BLUD KPHP Bungo II dapat terbit. Di samping itu, mekanisme bisnis yang juga dapat ditempuh dalam mewujudkan kegiatan bisnis usaha pemanfaatan hasil hutan adalah melalui skema kemitraan. Secara rinci kebutuhan prioritas KPHP Bungo II dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat dan penguatan kelembagaan KPH

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan Fakultas Kehutanan Universitas Jambi yang telah mendanai, serta pihak-pihak yang telah membantu di lapangan dan mendukung terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, R. dan Tati R. 2014. Pengelolaan HHBK Menuju KPH Mandiri (Studi Kasus di KPHP Boalemo). PT Kanisius. Yogyakarta.
- Ekawati, S., Sri, S., Syaiful, A. 2020. Bersama Membangun Perhutanan Sosial. PT Penerbit IPB Press. Bogor
- Fitrawan, R., Syukur, U., dan Irmasari. 2014. Analisis Ekonomi Prospektif Pengembangan KPH Dampelas Tinombo Berbasis PHBM di Desa Karya Mukti. Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako.
- Hamzah, H., Suharjito, D., & Istomo, I. (2015). Efektifitas Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan pada Masyarakat Nagari Simanau, Kabupaten Solok. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan*, 2(2), 116-128.
- Handadhari, T. 2014. KPH Sebagai Kelembagaan Ideal Kehutanan: Konsep Versus Realitas. Wana Aksara. Banten.
- Hernowo, B., Sulistya, E., Mariana, T., dan Alfonso, H. 2014. Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Langkah Awal Menuju Kemandirian. PT Kanisius. Yogyakarta.
- Ichsan, A. Chairil dan Gumay, FI. 2015. Penilaian Kinerja Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Hutan Tropis*. Vol. 3.2.
- Jhingan, M. L. 2012. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Rajawali Press: Jakarta
- Karyon, E. Y., Emi, R., dan Joko, N. R. 2016. Pendapatan Masyarakat dari Hasil Hutan Bukan Kayu di Sekitar Kawasan Cagar Alam Raya Pasi Kelurahan 49 Nyarumkop Kecamatan Singkawang Timur. *Jurnal Hutan Lestari*. Vol. 4.3.
- Nurrochmat DR, Darusman D, Ekawati M. 2016. *Kebijakan Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan*. IPB Press. Bogor.
- Setyarso A, Djajono A, Nugroho B, Wulandari C, Suwarno E, Kartodihardjo H, Sardjono, MA., 2014. *Strategi Pengembangan KPH dan Perubahan Struktur Kehutanan Indonesia*.

- Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Siep, N., Paskalis, L., & Warsiyah, W. (2019). Analisis Peran Serta Masyarakat dalam Penerapan Kearifan Lokal pada Pengelolaan Hutan di Distrik Kayo Kabupaten Yahukimo Papua. *Jurnal Rekayasa Lingkungan*, 19(1).
- Rubynski, P., Wulandari, C., Herwanti, S., & Febryano, I. G. (2018). Peran Kelembagaan Nagari dalam Pengelolaan Hutan di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok. *Gorontalo Journal of Forestry Research*, 1(2), 30-39.
- Irawan, A., Iwanuddin, I., & Ekawati, S. (2017). Analisis Persepsi dan Perilaku Masyarakat terhadap Keberadaan Kawasan KPHP Model Poigar. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 14(1), 71-82.
- SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: SK.8658/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPLO /12/2018.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Lembaran Negara RI Tahun 2007. Sekretariat Negara. Jakarta